

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 5 No. 2 Tahun 2023

Solusi Kebijakan untuk Menangani Penurunan Volume Bahan Baku Industri Crumb Rubber Indonesia

Penulis

Hermanto Siregar¹, Tanti Novianti¹, Amzul Rifin², Suprehatin²

¹ Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

² Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

Ringkasan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut :

- (a) Persistensi harga karet alam yang rendah dan produksinya yang terus menurun tidak hanya menyebabkan pendapatan petani karet semakin menurun namun juga berdampak pada penurunan volume bahan baku industri *crumb rubber* Indonesia
- (b) Sinergitas solusi kebijakan perdagangan karet alam baik *short term* maupun *long term* dengan kebijakan-kebijakan komplemen lainnya diharapkan dapat menangani penurunan harga dan volume bahan baku industri *crumb rubber* dan mengembangkan industri perkaretan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Rekomendasi

Solusi kebijakan mengatasi penurunan harga karet alam dan volume bahan baku industri *crumb rubber* yang dapat menopang keberlanjutan industri perkaretan nasional mencakup kebijakan perdagangan jangka pendek dan panjang serta kebijakan komplemen lainnya. Kebijakan perdagangan jangka pendek mencakup perencanaan pemasaran luar negeri dan publikasi secara sistematis informasi (data) karet alam Indonesia. Kebijakan perdagangan jangka panjang meliputi hilirisasi sekaligus penganeka-ragaman dan pengembangan pasar ekspor, kebijakan *auction* untuk karet alam dalam negeri di bursa berjangka, dan perbaikan kebijakan regional lingkup ASEAN. Kebijakan komplemen lainnya berupa komitmen kebijakan pertimbangan nilai ekonomi hijau komoditas karet dan *carbon trading (green economic)* serta pengembangan komoditas secara berkesinambungan.

Solusi Kebijakan untuk Menangani Penurunan Volume Bahan Baku Industri *Crumb Rubber* Indonesia

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara produsen dan pengekspor karet alam utama dunia bersama Thailand. Karet alam merupakan komoditas strategis bagi Indonesia karena kontribusinya yang besar, baik terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan bagi lebih dari 2 juta kepala keluarga petani di pedesaan, maupun terhadap pelestarian lingkungan dengan potensi nilai ekonomi hijaunya. Perkebunan karet di Indonesia didominasi oleh perkebunan karet rakyat. Pada tahun 2020, area perkebunan karet rakyat mencapai 3,2 juta hektar atau sekitar 88% dari total areal karet nasional, dengan produksi sekitar 83% dari total produksi karet alam nasional (Ditjenbun, 2020).

Meskipun demikian, industri karet alam nasional saat ini mengalami berbagai tekanan dari hulu sampai hilir, seperti penurunan produksi akibat serangan hama dan penyakit serta perubahan cuaca, penurunan harga karet dunia pada waktu yang lama, *idle capacity* industri *crumb rubber* dan ketidakefisienan pola perdagangan karet global (Gapkindo 2021a; Gapkindo 2021b). Permasalahan pada rantai pasok karet alam tersebut pada akhirnya berdampak buruk terhadap kesejahteraan petani produsen karet alam “bokar” (Kopp et al. 2017). Petani mengalami penurunan motivasi untuk mempertahankan dan mengembangkan usahatani karetnya, sehingga berdampak pada penurunan volume bahan baku industri *crumb rubber* Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan solusi kebijakan untuk menangani penurunan harga dan volume bahan baku industri *crumb rubber* serta mengembangkan industri perkaretan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Di lain pihak, struktur pasar pada rantai pasok karet alam Indonesia cenderung bersifat

oligopsonistik. Kekuatan pasar pada industri ban sebagai pengguna karet alam Indonesia mampu mendikte tingkat harga yang diterima perusahaan pengolah atau eksportir produk primer karet alam Indonesia, yang pada gilirannya ditransmisikan ke tingkat petani. Industri ban multinasional cenderung melakukan pembelian karet dengan pola *long term contract* (LTC) untuk *forward* 12 bulan. Perusahaan pengolah atau eksportir Indonesia banyak yang mengikuti pola LTC tersebut. Dengan kata lain, volume perdagangan karet alam Indonesia dengan pola ini diperkirakan dominan di dalam portfolio penjualan mereka. Sayangnya, dengan pola transaksi seperti ini harga yang diterima perusahaan pengolah sulit untuk meningkat, sehingga harga yang diterima petani cenderung tetap rendah. Selain itu, tingkat harga dengan pola transaksi LTC tidak berkorelasi dengan harga karet di bursa Singapura (SICOM) sehingga dapat dikatakan bahwa bursa SICOM belum berfungsi sebagai *price discovery platform* untuk karet alam Indonesia. Hal ini berarti bahwa industri perkaretan Indonesia tidak diuntungkan dengan adanya pola perdagangan LTC.

Struktur dan perilaku pasar karet tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani karet. Sebagai ilustrasi, rasio antara harga karet (bokar) dan harga beras di tingkat petani terus mengalami penurunan, dari yang dulunya di atas 1 menjadi sekitar 0,6 pada bulan November 2020 (BPS 2021; Gapkindo 2021b)

Kondisi tersebut menyebabkan demotivasi bagi petani karet, sehingga kinerja tanaman karetnya cenderung semakin menurun. Hal ini mengancam keberlanjutan pasokan bahan baku karet alam yang dapat membawa efek berantai terhadap kinerja industri pengolahan karet alam nasional, bahkan mungkin global juga.

Persistensi harga karet alam yang rendah dan produksinya yang semakin turun menyebabkan semakin jatuhnya pendapatan petani karet, sehingga meningkatkan kemiskinan mereka. Berdasarkan hal ini dan permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas, diperlukan solusi kebijakan perkaretan yang dapat mengatasi persoalan persistensi harga karet alam yang rendah serta risiko penurunan pasokan bahan baku karet alam. Solusi kebijakan yang dapat dikatakan memiliki nilai strategis tersebut mencakup aspek perdagangan baik kebijakan pendek maupun jangka panjang, dan kebijakan komplement lainnya.

Kebijakan Jangka Pendek pada Aspek Perdagangan

Solusi kebijakan jangka pendek pada aspek perdagangan untuk mengatasi penurunan harga karet alam dan volume bahan baku industri *crumb rubber* yang dapat menopang keberlanjutan industri perkaretan nasional sebagai berikut.

Pertama, merekomendasikan Pemerintah RI agar menerapkan perencanaan pemasaran luar negeri terhadap karet alam Indonesia. Dalam hal ini, pemasaran karet alam ke luar negeri dilaksanakan secara terencana, misalnya setiap enam bulan (semester). Berdasarkan proyeksi produksi karet alam satu tahun ke depan, pemerintah menetapkan volume yang akan dipasarkan ke luar negeri, misalnya X ribu ton. Rencana volume ekspor ini akan dikirimkan per periode misalnya sebanyak X_1 ribu ton di semester ke-1, X_2 ribu ton di semester ke-2 (dimana $X_1 + X_2 = X$). Menjelang akhir suatu semester, pemerintah dapat merivisi volume yang akan dipasarkan ke luar negeri untuk semester depannya, berdasarkan perkembangan produksi karet alam dalam negeri dan situasi perdagangan internasional karet alam mutakhir.

Anggota-anggota Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) bersepakat sesamanya, sedemikian rupa sehingga total volume ekspor seluruh anggota tersebut untuk tiap semester sesuai dengan volume ekspor yang telah direncanakan pemerintah untuk semester tersebut.

Volume ekspor setiap anggota sesuai dengan proporsi eksportnya terhadap total ekspor seluruh anggota pada tahun sebelumnya.

Kontrak pemasaran setiap anggota GAPKINDO atau eksportir dengan pabrik ban (pembeli di luar negeri) dibuat mengikuti periode pengiriman tersebut di atas, yaitu per semester. Dengan demikian, kontrak yang sebelumnya hanya satu saja untuk satu tahun akan terpilah-pilah (*staggered*) menjadi dua, dengan durasi (*term*) setiap kontrak selama enam bulan. Hal ini diperkirakan akan mendorong dinamika harga karet alam yang diterima perusahaan pengolah atau eksportir karet alam dan juga petani.

Volume ekspor karet alam yang dijual secara kontrak oleh anggota GAPKINDO di semester tertentu ditambah dengan volume ekspor yang dijualnya secara spot di semester tersebut adalah sesuai dengan volume ekspor yang telah disepakati untuk anggota GAPKINDO itu di semester tersebut.

Adanya kontrak-kontrak yang *staggered* seperti ini potensial mendorong pembeli luar negeri untuk melakukan *hedging* (Taylor 1999). Harga forward yang akan dirujuk akan semakin mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran saat ini dan proyeksinya ke depan. Diperkirakan bursa SICOM akan semakin tajam memonitor kondisi tersebut, sehingga dinamika harga lebih mendekati situasi permintaan-penawaran yang sesungguhnya dan mengatasi persoalan asimetris.

Kedua, merekomendasikan Pemerintah RI atau *stakeholders* terkait mempublikasikan secara sistematis informasi atau data karet alam, antara lain permintaan, penawaran, tingkat harga di berbagai tataran dari pasar internasional hingga petani, serta proyeksinya. Keterbukaan informasi pasar seperti ini akan menghilangkan (atau setidaknya mengurangi) praktek penerapan harga yang asimetris dan *misalignment* dalam bentuk harga beli pabrik ban yang rendah sementara pasokan karet alam bahkan “bokar” telah dan sedang menurun.

Agar informasi atau data tersebut menjadi pertimbangan bursa SICOM dalam pembentukan harga, sebaiknya Pemerintah RI dan/atau para *stakeholders* terkait melakukan komunikasi efektif dengan bursa SICOM. Langkah ini bukan bertujuan untuk membuat harga yang *bias* namun untuk menyediakan informasi komprehensif kepada mereka, sehingga *price discovery* berlangsung secara lebih simetris—tidak satu arah yaitu dari sisi permintaan (oleh pembeli luar negeri) melainkan dari kedua sisi permintaan dan penawaran.

Kebijakan Jangka Panjang

Solusi kebijakan jangka panjang pada aspek perdagangan untuk menangani penurunan harga dan volume bahan baku industri *crumb rubber* dan mengembangkan industri perkaretan nasional yang berkelanjutan sebagai berikut.

Pertama, merekomendasikan Pemerintah RI untuk mendorong berlangsungnya hilirisasi sekaligus penganeka-ragaman dan pengembangan pasar ekspor. Kebijakan hilirisasi ini bertujuan menghasilkan baik *intermediate products* maupun *final products*. Kebijakan ini tentunya dapat memberi nilai tambah kepada perekonomian, menganeka-ragamkan produk yang dihasilkan (misalnya bahan baku non ban dan produk-produk kesehatan), dan potensial menstabilkan pendapatan setiap pelaku rantai pasok karet.

Berkaitan dengan kebijakan ini, perlu adanya penguatan iklim usaha pengembangan industri hilir karet berbasis UMKM. Hal ini dalam upaya peningkatan konsumsi domestik karet alam untuk industri hilir dalam negeri menggunakan keunggulan komparatif bahan baku sesuai bangun arsitektur industri primer karet alam yang didominasi oleh karet padat khususnya SIR, baik untuk pasar ekspor maupun substitusi impor.

Kebijakan ini juga perlu adanya penggunaan barang jadi karet produk dalam negeri sebagai substitusi impor dalam pemenuhan komponen barang karet untuk industri dan infrastruktur antara lain *conveyor belt*, *dock fender*, *seismic bearing*, *bridge bearing*, aspal karet, *rubber*

dum, maupun produk inovatif seperti perahu karet, *cow mat*, *paving block*, *rubber tile* yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Dengan kebijakan tersebut diharapkan konsumsi domestik karet alam dapat ditingkatkan dari saat ini yang mencapai 600 ribu ton per tahun menjadi 800 ribu ton per tahun.

Selain itu, diperlukan juga kebijakan pengembangan pasar ekspor terhadap produk-produk hasil hilirisasi tersebut, dalam arti produk-produk itu diproduksi berdasarkan potensi pasar di negara-negara destinasi ekspor non-tradisional. Hal ini sejalan dengan pendekatan *industrialization does not create its own market, market does lead industrialization*.

Kedua, merekomendasikan Pemerintah RI menerapkan kebijakan *auction* untuk karet alam dalam negeri di Bursa Berjangka. Keberadaan Bursa Berjangka dalam negeri yang efektif dapat mendorong perkembangan jangka panjang dari volume permintaan dan penawaran, serta potensial menstabilkan harga karet alam.

Ketiga, merekomendasikan Pemerintah RI memperbaiki kebijakan regional lingkup ASEAN yang saat ini ada, sedemikian rupa sehingga negara-negara produsen karet alam anggota ASEAN kompak dalam arti para eksportirnya beroperasi sebagaimana layaknya sebuah entitas. Hal ini untuk mengimbangi *market power* dari pembeli luar negeri yang memang signifikan mengingat struktur pasar eksisting yang oligopsonistik

Kebijakan Komplemen atau Aspek Lainnya

Selain kebijakan pada aspek perdagangan, pengembangan industri karet nasional memerlukan komitmen kebijakan atau *political will* pemerintah yang kuat pada aspek lainnya sebagai berikut:

Pertama, mempertimbangkan nilai ekonomi hijau komoditas karet sebagai komoditas yang mampu menyerap 34 ton CO₂ dan melepas 13 ton O₂ per ha per tahun, yang jelas memiliki fungsi secara global. Mempertimbangkan juga peran perkebunan karet yang memiliki fungsi sebagai

pengatur tata air dan *catchment area* yang sangat penting pengaturan kesinambungan pengelolaan sumberdaya air.

Kedua, dengan fungsinya tersebut di atas, dengan sifat spesifik tanaman karet yang hanya tumbuh di wilayah tropis, perlu dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong aspek *carbon trading* (*green economic*) untuk komoditas karet, sehingga nilai tambah karet juga dapat diperoleh dari sisi fungsi lingkungan yang ditimbulkannya.

Ketiga, dalam pengembangan komoditas karet secara berkesinambungan diperlukan juga komitmen pemerintah membangun skema sistem pendanaan secara spesifik sesuai karakteristik komoditas karet untuk pembiayaan di seluruh rantai nilai industri karet termasuk untuk program peremajaan karet rakyat secara bertahap dan pengembangan bibit berkualitas.

Sinergitas antara solusi kebijakan pada aspek perdagangan atau ekspor karet alam baik yang bersifat *short term* maupun *long term* dan kebijakan-kebijakan komplemen sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat menangani penurunan harga dan volume bahan baku industri *crumb rubber* dan mendorong pengembangan industri perkaretan nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. Rata-rata Harga Beras di Tingkat Perdagangan Besar (Grosir) Indonesia. Badan Pusat Statistik.

[Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI. 2020. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021

[Gapkindo] Gabungan Pengusaha Karet Indonesia. 2021a. Produksi Industri Pengolahan Karet. *Unpublished*

[Gapkindo] Gabungan Pengusaha Karet Indonesia. 2021b. Harga Karet di Tingkat Petani . *Unpublished*

Kopp, T., Brümmer, B., Alamsyah, Z. and Patricia, R.S., 2017. Welfare implications of intertemporal marketing margin manipulation. *British Food Journal*. 119(8), pp. 1656-1671

Taylor JB (1999). Staggered price and wage setting in macroeconomics. *Handbook of macroeconomics*, 1, pp.1009-1050.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Hermanto Siregar, Guru Besar Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan Rektor Rektor Perbanas Institute. Beliau merupakan pakar di bidang makroekonomi, moneter, dan keuangan (finance). (*Corresponding Author*)

hsiregar@apps.ipb.ac.id



Tanti Novianti, Dosen di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan Kepala Kantor Audit Internal IPB. Beliau memiliki kepakaran di bidang ekonomi pembangunan.



Amzul Rifin, Guru Besar Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan merupakan pakar di perdagangan internasional terutama yang terkait dengan kebijakan perdagangan produk pertanian Indonesia.



Suprehatin, Dosen di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan merupakan pakar di bidang rantai nilai pertanian dan pangan, pemasaran dan kebijakan agribisnis.



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680